

**PERAN PARTAI POLITIK KOALISI DALAM KEMENANGAN
PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN ROKAN
HULU**

Oleh : Asrol Fickri

Email : asrol.fickri0692@student.unri.ac.id

Pembimbing : Prof. Dr. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This thesis discusses the application of the function of coalition political parties to the winning of candidate pairs in the 2020 Pilkada in Rokan Hulu Regency. This coalition party was formed in the candidate pair No. Order 2 Sukiman-Indra Gunawan. Within the coalition party there are six political parties with 26 out of 45 seats or 60% of the seats for members of the Rokan Hulu DPRD. With this, the 20% parliamentary seat threshold has been crossed with the supporting parties, namely the Gerindra party, the Democrat Party, PKS, PDI-Perjuangan, Nasdem Party, and Hanura Party. The problem in this study is that the role of coalition political parties is not directly proportional to the victory obtained in the legislative election against the victory in the 2020 Rokan Hulu regional election, which was only a difference of 0.92%. This study aims to analyze the role of coalition political parties in the victory of pair No. Order 2 Sukiman-Indra Gunawan in the 2020 simultaneous local elections in Rokan Hulu Regency.

This research approach is qualitative with descriptive research type. The research locations are in Rokan Hulu Regency, the Rokan Hulu Regency KPU Office, the Rokan Hulu DPRD, and also the Rokan Hulu Maju Coalition Team. Data collection using interview and documentation techniques. Data analysis techniques using qualitative analysis techniques. Researchers use Miriam Budiarjo's theory (2008) regarding the function of political parties in a democratic country, namely as political socialization, political recruitment, political communication, and a means of regulating conflict.

The results of this study are that the role of coalition political parties in winning candidate pair No. Sort 2 Sukiman-Indra Gunawan was successfully carried out by going through the process and stages of carrying out this role. Coalition political parties use political socialization towards society, as well as political recruitment by political parties in determining the candidates they carry. Not only that, the coalition political parties also implemented political communication by carrying out political campaigns and also succeeded in suppressing conflicts that existed in society both during the regional elections and after the regional elections.

Keywords: *pilbup, the political coalition, prospective spouse.*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung diatur oleh undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 56 sampai pasal 119 dan juga peraturan pemerintah No 6 tahun 2005 tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan PP. No 6 tahun 2005 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “ pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.” Sejak berlakunya undang-undang No. 32 tahun 2004 pilkada langsung di Indonesia pertama kalinya dilakukan pada Juni tahun 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Pilkada serentak pada tahun 2015 yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Mengenai Pilkada serentak tahun 2020 dan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi covid 19 dan juga demi menjaga stabilitas politik dalam negeri diatur dalam undang-undang No 6 Tahun 2020 tentang penetapan

perpu No. 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga UU No. 1 tahun 2015 tentang pemilihan pejabat setingkat Gubernur, Walikota, dan Bupati. Dalam Pilkada tersebut tercatat bahwa kabupaten Rokan Hulu sebagai peserta dan daerah yang mengadakan Pilkada serentak tahun 2020. Dalam hal ini terdapat 3 calon pasangan dalam kontestasi Pilkada serentak di kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 yaitu nomor urut 1, Hamulian-M. Syahril Topan diusung oleh partai Golkar dan PPP. Kemudian nomor urut 2 Sukiman-Indra Gunawan yang diusung oleh partai Gerindra, PDI-Perjuangan, Demokrat, Nasdem, PKS, Hanura, dan Partai Gelora. Kemudian pasangan terakhir yaitu nomor urut 3 Hafith Syukri-Erizal diusung oleh partai PKB dan PAN.

Pada awalnya koalisi partai politik terbentuk melalui keputusan bersama dalam merekrut dan mengusung pasangan calon bupati petahana dan wakil bupati yang didukung oleh beberapa partai besar yang ada seperti Gerindra, PDI-Perjuangan, Demokrat, Nasdem, PKS, dan Nasdem. Peran partai politik setelah koalisi yaitu dengan melakukan sosialisasi politik dengan melakukan kampanye dialogis, dengan melakukan pemasangan umbul-umbul, baliho, pamflet dan beberapa bagian dari pemasangan di beberapa tempat oleh tim kampanye dan relawan.¹ Dalam

¹Olis Linani, “PELAKSANAAN SOSIALISASI POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN MELALUI MEDIA LUAR

sosialisasi politik ini disampaikan tentang norma-norma dalam visi dan misi calon bupati dan wakil bupati.

Berdasarkan perhitungan suara yang telah dilaksanakan oleh KPU kabupaten Rokan Hulu menetapkan bahwa pasangan nomor urut 2 Sukiman-Indra Gunawan memperoleh suara tertinggi oleh KPU. Yang tertuang dalam keputusan No/620/P.L02..6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 pasangan nomor urut 2 Sukiman-Indra Gunawan memperoleh suara 92.392.

Tabel 1. 1 perolehan suara sah pilbup Rohul 2020

No. Urut	Nama pasangan calon Bupati dan wakil Bupati	Jumlah suara yang sah	Persentase
01	Hamulian-M. Syahril Topan	49.007	21.2%
02	H. Sukiman-H. Indra Gunawan	91.806	39.9%
03	Ir. H. Hafith Syukri-Erizal	90.570	38.9%

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dengan total suara 100% dari tiap

kecamatan yang ada menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang ada di kabupaten Rokan Hulu sangat tinggi dan antusias. Namun, dalam pelaksanaan pemilihan yang berlangsung terdapat hal yang menjadi tolak ukur kemenangan pasangan nomor urut 2 Sukiman-Indra Gunawan dapat memperoleh suara tertinggi. Tercatat lebih dari separuh dukungan yang ada didalam koalisi tim sukses adalah partai yang notabene merupakan partai pendukung. Sukiman merupakan kader dari partai gerindra yang merupakan pemilik kursi DPRD terbanyak tidak dapat melewati treshold 20% dukungan yang ada. Sehingga, butuh dukungan partai lainya yang memiliki kursi di DPRD. Uniknya, Sukiman mampu menarik dukungan dari partai yang ada dalam kursi DPRD sehingga dapat meraup kursi dan dukungan yang gemuk pula.

Tabel 1. 2 perolehan suara dan kursi koalisi partai paslon No 2

No	Nama Partai	Status Partai Koalisi	Kursi di DPRD kab .	Jumlah suara pileg 2019
1	Partai Gerindra	Pengukung	8	21.196
2	Partai PDI-Perjuangan	Pengukung	6	12.617
3	Partai Demo	Pengukung	4	10.470

	krat			
4	Partai Nasdem	Pendukung	4	8.381
5	Partai PKS	Pendukung	4	7.111
6	Partai Hanura	Pendukung	1	2.109
Total			27	61.884

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa koalisi partai pendukung justru lebih dominan dibandingkan dengan partai pengusung. Artinya bahwa kemenangan yang didapat oleh pasangan No urut 2 ditentukan dengan banyaknya usungan yang ada dalam sebuah koalisi. Jika dilihat dari grafik perkembangan terhadap Pilkada dengan pileg tahun 2019 terlihat jelas bahwa suara yang banyak tersebut belum mampu membawa kemenangan yang besar dari koalisi No. urut 2 pasangan Sukiman-Indra Gunawan. Pasangan No urut 2 hanya terpaut beberapa suara dari pasangan No urut 3, hal itu menjadi sebuah permasalahan yang ada. Dengan demikian penulis melihat adanya peran partai yang belum maksimal dalam mengusung pasangan No. urut 2 pada Pilkada 2020 di kabupaten Rokan Hulu. Seharusnya partai koalisi yang besar mampu meraih suara lebih dari 30% pendukung dan masyarakat yang ada. Koalisi partai yang diharapkan ini tentunya menjadi peran yang sangat signifikan dalam perkembangan politik yang ada di kabupaten Rokan Hulu.

Dukungan partai politik dan tim sukses menjadi acuan yang dapat memenangkan pasangan calon yang ada pada saat itu sehingga partai koalisi dan pasangan calon No urut 2 memenangkan kontestasi Pilkada di kabupaten Rokan Hulu tahun 2020. Hal ini juga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait kontribusi dan peran partai politik dalam memenangkan pasangan No. urut 2 pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal ini peneliti beranggapan kemenangan pasangan no urut 2 dipengaruhi oleh peran partai pendukung yang solid, dan modal politik yang kuat sehingga mampu memanfaatkan isu yang berkembang ditengah masyarakat. Untuk itu, melihat adanya peran partai koalisi ini peneliti ingin meneliti masalah yang ada dengan judul “ **Peran Partai Politik Terhadap Kemenangan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati No Urut 2 Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu.**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah berupa pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana peran partai politik terhadap kemenangan pasangan Nomor urut 2 calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati serentak tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu ?

1.3. Tujuan Penelitian

2020 di Kabupaten Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : Untuk menganalisis peran partai politik koalisi terhadap kemenangan pasangan nomor urut 2 Sukiman-Indra Gunawan pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati serentak tahun Rokan Hulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini mampu menjadikan bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya dan mampu memberikan pemahaman mengenai peran partai politik dan strategi politik terkhusus mengenai pemenangan terhadap pasangan calon nomor urut 2 pada Pilbup serentak 2020 di kabupaten Rokan Hulu.
2. Secara praktis, diharapkan mampu menjadikan bahan literasi bagi masyarakat umum, pemerintah, maupun partai politik terkait peran partai politik dalam pemenangan yang ada terutama saat Pilkada.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan bahan rujukan dan media informasi bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Dalam hal ini juga menjadikan sebagai salah satu syarat akhir untuk menyelesaikan strata 1 pada jenjang perkuliahan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga negaranya untuk turut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan dan demokrasi serta pemerintahan. Partai politik ini pertama kali berkembang di negara Eropa Barat. Dalam hal tersebut terdapat adanya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dan diperhitungkan dalam proses politik. Oleh karena itu, partai politik lahir secara spontan dan menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintahan secara kesinambungan.² Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan salah satu organisasi politik diluar struktural negara sebagai struktur antara suprastruktur pemerintahan negara dengan infrastruktur kehidupan bersama masyarakat. Dalam perkembangannya juga sangat banyak dengan mengisi realitas dari awal kemerdekaan yang ada sehingga pada dasarnya dan awalnya pemerintahan dibentuk dengan metode parlementer. Partai politik menjadi sebuah kegandaan hak dalam demokrasi yang ada. Partai politik merupakan aktor kolektif yang menjadi sebuah legitimasi keputusan dengan partisipasi. Wujud dari presentasi rakyat yang ada dengan membuat sebuah legitimasi kebijakan atas nama rakyat.³

²Miriam Prof Budiarjo, *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*, cetakan ke. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).

³NFN Efriza, "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The

2. Koalisi Partai Politik

Koalisi partai politik merupakan kajian dalam ilmu politik yang menarik. Menurut Lijphat (1995), koalisi merupakan interaksi yang terjadi dalam kelompok maupun individu yang tergabung dalam suatu struktur organisasi formal kemudian membentuk kerjasama secara independen yang saling menguntungkan serta berorientasi pada isu yang sama dan juga melakukan aksi yang sama pula. Dalam negara yang multi-partai dapat dipastikan bahwa tidak ada partai yang berkuasa tanpa adanya koalisi dengan partai lainnya.⁴ Sementara itu, ada 3 macam bentuk koalisi berdasarkan soliditas koalisinya yang disampaikan Indrayana(2011), yaitu koalisi ideologis yang memiliki kesamaan platform, visi-misi, dan cita-cita pembangunan yang ada. Kemudian ada koalisi strategis yang merupakan kerjasama dalam memenangkan pemilu, maupun pilkada yang kemudian akan bubar setelah selesai pemilu atau pilkada tersebut. Kemudian terakhir yaitu koalisi pragmatis yang terbentuk berdasarkan alasan pragmatis yang tergantung dengan isu politik yang dihadapi.⁵

Political Parties in Public Perception],” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 10, no. 1 (2019): 17–38.

⁴ Sopian Ependi Manalu and Nurul Nurhandjati, “Dinamika Koalisi Partai Politik Dalam Pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018,” *Journal Publicuho* 4, no. 4 (2021): 1025–1042.

⁵ Denny Indrayana, *Indonesia Optimis* (Jakarta: CV. Bhuana Ilmu Populer, 2011).

3. Pilkada

Dalam melaksanakan implementasi dari Pilkada tersebut tentunya menjadi dasarnya adalah upaya dalam membentuk penguatan demokrasi pada tahap lokal. Dalam konteks otonomi daerah yaitu dengan memberikan seluas-luasnya kebijakan untuk mengatur daerahnya sendiri. Pilkada langsung merupakan pelaksanaan fungsi dari *effective government*. Hal diartikan sebagai penguatan kapasitas masyarakatnya. Joel Migdad (1988) *effective government* adalah menyangkut kapabilitas dan kapasitas dalam mengatur pemerintah, dengan melakukan penetrasi dan mengatur relasi sosial.⁶

Pelaksanaan Pilkada langsung lahir merupakan bagian dari pelaksanaan Pilkada melalui perwakilan (DPRD) yang tercantum dalam UU. No. 22 Tahun 1999. Koreksi ini terus kentara dengan diimplementasikannya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan direvisi lagi dengan UU No. 12 tahun 2008. Dengan adanya perdebatan yang muncul terhadap pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah yaitu bupati, Walikota, maupun gubernur dipilih secara demokratis. Dalam mendukung penguatan dalam hal tersebut muncullah PP No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan kepala daerah. Sejak berlakunya UU dan PP tersebut Pilkada langsung di

⁶Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*, cetakan pe. (Yogyakarta: CV. PUSTAKA BELAJAR, 2009). Hal 27

Indonesia dilaksanakan pertama kalinya pada Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan diikuti daerah lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan yang lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek dan gejala tertentu. Teknik ini adalah suatu objek dan paradigma baru dalam memandang suatu gejala/realitas/dan fenomena tertentu. Penelitian ini digunakan pada kondisi objek yang alamiah, dengan hasil yang lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu dengan teori akan tetapi dengan fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis bersifat induktif.⁷

Dalam mengenali hal tersebut penelitian kualitatif memiliki berbagai bentuk antara lain yaitu cenderung mengonstruksi realita sosial, berfokus pada interpretasi dan peristiwa, keaslian sebuah hal yang penting, tidak terikat dengan nilai dan angka, bergantung pada situasi dan konteks, terjadi dalam beberapa kasus dan subjek, bersifat analisis yang tematik, peneliti terlibat didalamnya, dan kasus merupakan bentuk dari fenomena sosial yang terjadi dalam kondisi tertentu. Dalam penelitian kualitatif proses penelitian

⁷Dr H Zuchri Abdussamad, S.IK.,M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, ke satu. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

merupakan suatu yang lebih penting dibandingkan hasil.⁸

Lokasi Penelitian

Menurut Burhan Bungin (2007)⁹, dalam sebuah penelitian ilmiah peneliti diharuskan menentukan lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu dengan objek yang diteliti yang ada dalam kewenangan pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu. Alasan yang melatarbelakangi peneliti memilih tempat di Kabupaten Rokan Hulu adalah yang pertama, lokasi tersebut merupakan tempat tinggal peneliti sehingga akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data dan menghemat anggaran dan biaya dalam melakukan penelitian ini. Yang kedua adalah peneliti melihat adanya fenomenologi yang ada di lapangan berkaitan dengan peran partai politik yang ada terhadap kemenangan pasangan calon No. Urut 2 Sukiman-Indra Gunawan yang berpengaruh terhadap calon inclumber ataupun calon petahana tersebut. Tentunya dengan adanya hal ini menjadi hal yang menarik terkait bagaimana peran partai politik pengusung pasangan calon No urut 2 Sukiman dan Indra Gunawan serta bagaimana strategi politik yang dijalankan dalam pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu.

Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yang ada yaitu data primer dan sekunder.

⁸Dr Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, kesatu. (Yogyakarta: LPPM UPN VY Press, 2020).

⁹Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Radja Grasindo Persada, 2011).

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari informan. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah dari teknik wawancara, angket, dan observasi langsung. Yang menjadi data primer adalah partai politik dan masyarakat yang ada dalam kesatuan wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan literatur perpustakaan, artikel, jurnal dan sumber dari media massa ataupun dokumentasi yang ada.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang diperoleh melalui informan. Dalam hal ini juga yang menjadi sumber data adalah orang, tempat dan dapat diperoleh melalui kata-kata serta tindakan yang didapatkan di lapangan. Selain itu juga yang bisa dijadikan sumber data dalam penelitian ini dapat berupa dokumen. Dalam sumber data ini juga terdapat validitas dan uji keabsahan data yang diperoleh melalui triangulasi sumber data yang ada. Dalam hal ini juga terdapat sumber data pembandingan untuk menentukan dan memastikan keabsahan data yang diperoleh.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut yaitu ; interview atau wawancara. Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dengan mengedepankan wawancara, khususnya wawancara mendalam. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dan informan, dengan atau tanpa pedoman wawancara,

dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Kemudian adalah dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan hal itu, sejumlah besar data dapat diperoleh melalui bahan yang berbentuk dokumentasi seperti halnya dengan surat-surat, catatan harian, cendramata, foto dan sebagainya. Kemudian adalah media massa yaitu mengumpulkan data melalui media massa yaitu sejumlah media yang digunakan untuk mengakses data yang ada dalam hal ini terdapat surat kabar, majalah, film, radio, televisi, internet, dan lainnya.

Teknik Analisa Data

Metode penelitian yang digunakan dengan penelitian ini adalah metode dengan penelitian analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka dan tidak data juga disusun dalam kategori/struktur klasifikasi. Data (dalam wujud kata-kata) mungkin telah dikumpulkan dengan berbagai teknik dan cara (observasi, wawancara, inti sari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih alat tulis). Akan tetapi dalam hal ini analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang disusun dalam teks yang diperluas, serta tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga yaitu redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

GAMBARAN UMUM MASALAH PENELITIAN

Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu Terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, tentang pembentukan kabupaten /Kota di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan diresmikan oleh Gubernur Riau dan Operasional Pemerintah daerah pada tanggal 5 Desember 1999. Semenjak terbentuknya kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sampai tahun 2022 sudah mengalami 4 kali pergantian masa jabatan Bupati dan Kepala daerah. Kabupaten Rokan Hulu pada awal terbentuknya memiliki 7 kecamatan, yaitu kecamatan Rokan IV Koto, kecamatan Rambah, kecamatan Tandun, kecamatan Rambah Samo, kecamatan Rambah, kecamatan Kepenuhan, kecamatan Tambusai, dan kecamatan Kunto Darussalam.

Kabupaten Rokan Hulu sendiri pada saat sekarang ini merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada UU Nomor 53 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 1999, yang diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No.010/PUU-1/2004, pada tanggal 26 Agustus 2004. Kabupaten yang diberi julukan negeri seribu suluk ini mempunyai penduduk sebanyak 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7.449,85 km², dengan total daratan 85% dan total perairan 15%.

Polarisasi pembentukan Kabupaten Rokan Hulu ini

berdasarkan keputusan beberapa tokoh Rokan Hulu yang menghendaki pemekaran wilayah yang ada yang diusulkan kepada pemerintah Provinsi Riau pada saat itu. Pejabat Bupati pertama dijabat oleh H. Nurhasyim, S.H, pada tahun 1999, dan dilanjutkan oleh H. Achmad, M.Si pada tahun 2000 yang merupakan pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Berikut beberapa tokoh yang pernah menjabat sebagai bupati Rokan Hulu.

Gambaran Umum Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sukiman-Indra Gunawan

Gambaran tim pemenangan No urut 2 tersebut dapat menjadi sebuah gambaran koalisi yang dibentuk dalam memenangkan pasangan Sukiman-Indra Gunawan. Partai Gerindra merupakan partai yang menjadi pengusung secara total dalam kemenangan yang ada pada dasarnya sebagai ketua DPC yang ada dengan mengantongi suara yang besar tentunya dapat menjadi modal politik dan modal kursi yang ada di kursi DPRD. Pada saat itu juga dukungan dan SK yang keluar sebagai bentuk dari gambaran yang ada.

Adapun ketua tim koalisi terbentuk setelah adanya konsolidasi tim pemenangan yang ada sehingga mampu memberikan kontribusi setiap partai yang ada. Tim pemenangan dibentuk sesuai dengan komposisi yang ada dalam setiap partai yang mendukung pasangan calon No. urut 2 Sukiman-Indra Gunawan (SKAWAN). Tim tersebut diberi nama dengan "Tim Koalisi Rokan Hulu Maju" dengan diketuai oleh Kelmi Amri (demokrat). Sebagai sekretaris yaitu Hardi

Chandra (PDI-Perjuangan), dan Abdul Halim, S.Ag, S.H (Gerindra), sebagai bendahara.

Visi & Misi dan Program Kerja Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sukiman-Indra Gunawan

Adapun visinya yaitu “Bertekad untuk mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu yang lebih maju, berdaya saing, dalam keanekaragaman adat, budaya, berdasarkan nilai-nilai agama menuju masyarakat Rokan Hulu yang sejahtera”. Sementara itu misinya adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan pada tuhan yang maha esa, mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif, dan berdaya saing berbasis kerakyatan serta mengembangkan pembangunan pariwisata daerah, mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata kota, secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, aman, tentram didasarkan pada budaya, adat istiadat dan agama berbeda, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, efisien, melalui pelayanan publik yang transparan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Partai Politik sebagai fungsi Sosialisasi politik

Sosialisasi politik juga sebagai bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam

sistem politik. Setiap keberhasilan suatu proses sosialisasi politik ditentukan oleh faktor lingkungan dan keterkaitan unsur yang mempengaruhinya. Menurut Rush dan Althoff (2013) proses keberhasilan sosialisasi politik ditentukan oleh

a. Agen sosialisasi politik

Dalam melancarkan kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon yang ada tentunya terdapat agen sosialisasi politik yang bertugas untuk melakukan proses sosialisasi politik yang ada. Tim pasangan calon No. Urut 2 Sukiman-Indra Gunawan membentuk sebuah tim pemenangan untuk menampung kepentingan yang ada. Tim pemenangan ini dibentuk berdasarkan keputusan bersama tim koalisi partai yang ada terdiri dari Gerindra, PDI-Perjuangan, Demokrat, PKS, Nasdem, dan Hanura. Dalam hal lain media massa juga berperan penting sebagai bentuk dari agen sosialisasi politik. Media massa tersebut berfungsi sebagai bahan dalam mengampanyekan pasangan calon No. urut 2 Sukiman- Indra Gunawan. Sebagai salah satu agen yang penting media massa mengambil peran yang ada sehingga mampu memberikan pengaruhnya dengan membuat akun dan basis media yang ada baik itu di *facebook*, *instagram*, *twitter*, blog, iklan, pamflet,

- baliho, koran, serta berita *online* yang ada.
- b. Materi Sosialisasi Politik
Materi sosialisasi politik adalah bentuk nilai-nilai yang ditanamkan dan sikap-sikap politik yang ditanamkan oleh aktor politik dan agen politik yang ada sehingga mampu dalam menyampaikan nilai, sikap, pandangan terhadap masyarakat dan sasaran yang ingin diberikan materi yang disampaikan. Dalam tim pemenang dan tim koalisi pasangan calon No. urut 2 Sukiman dan Indra Gunawan menyampaikan ide, gagasan, pengetahuan, nilai, dan pandangan serta program kerja yang disampaikan kepada masyarakat.
 - c. Mekanisme Sosialisasi Politik
Dalam melakukan sosialisasi politik terdapat mekanisme yang dilakukan oleh agen sosialisasi politik yang ada. Dalam hal ini pasangan calon No Urut 2 melakukan kampanye yang dapat memotivasi masyarakat secara dasar untuk dapat memilih pasangan calon No Urut 2 Sukiman-Indra Gunawan.
 - d. Pola Sosialisasi Politik
Untuk melaksanakan dan melakukan sosialisasi politik tentunya terdapat pola yang dibentuk dan dijalankan oleh pasangan calon yang ada. Setiap tim koalisi tentunya memiliki pola yang berbeda. Pola yang dibuat tentunya menyesuaikan dengan titik dan kajian dari tim koalisi
- Dalam hal lainnya terdapat mekanisme dalam melakukan sosialisasi politik yaitu :
- a. Badan atau Organisasi yang menggelar sosialisasi politik
Dalam hal ini, badan atau organisasi yang menggelar sosialisasi politik yaitu tim koalisi Rokan Hulu Maju yang menjadi tim kampanye dan tim pemenangan pasangan No. urut 2 Sukiman dan Indra Gunawan.
 - b. Persiapan tim sosialisasi
Tim penyelenggara sosialisasi politik yaitu tim koalisi juga harus persiapan dan kebutuhan yang harus dipersiapkan dalam menyelenggarakan sosialisasi politik. Persiapan tersebut bisa berupa dana kampanye, tempat menyelenggarakan kampanye, souvenir, konsumsi, baliho dan spanduk yang ada.
 - c. Perumusan target dan hasil Pelaksanaan sosialisasi politik
Berdasarkan hal ini target yang ingin dicapai oleh tim koalisi Rokan Hulu Maju yaitu memenangkan Pilkada serentak tahun 2020. Perumusan tersebut tentunya juga diiringi dengan usaha yang dilalui dengan mensosialisasikan pasangan calon yang ada.
 - d. Pengembangan dan Penentuan Materi dan pameri yang disampaikan dalam sosialisasi politik.
Dalam hal ini juga, menentukan pameri yang ada tim koalisi juga

menunjuk tim ahli dan juru kampanye pada tiap daerah dan wilayah yang ada.

e. **Pemilihan Target sosialisasi Politik**

Mengenai target pemilih tentunya tim koalisi juga berkontribusi menentukan target yang dicapai. Menurut ketua tim koalisi target pemilih yaitu kaum milenial, ibu-ibu, dan pemilih yang berada diwilayah perbatasan dan wilayah yang belum memiliki basis suara dan basis dukungan.

2. Partai Politik sebagai fungsi Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik yaitu meliputi seleksi, pemilihan, pengangkatan seseorang maupun sebagian atau sekelompok orang untuk melaksanakan peran dalam pemerintahan. Ada beberapa hal yang menjadi pola rekrutmen politik:

a. **Sertifikasi**

Dalam hal ini, partai koalisi dan partai pengusung no urut 2 Sukiman-Indra Gunawan telah melakukan tahapan sertifikasi anggota calon bupati dan wakil bupati yang akan mereka usung. Dalam tahap ini adanya sebuah komunikasi dan lobi-lobi politik yang terjadi dalam sebuah usaha mendapatkan suara dan dukungan dari partai yang akan mendukung pasangan calon. Tentunya hal itu juga sejalan

dengan tahapan dan sesuai dengan regulasi dari konstitusi dan partai yang mengusung.

b. **Nominasi**

pasangan calon No. urut 2 Sukiman dan Indra Gunawan telah menjalankan proses nominasi yang ada pada partai koalisi sehingga dapat dicalonkan menjadi pasangan calon dan diusung oleh partai koalisi yang ada. Faktor dukungan, elektabilitas, popularitas, sepak terjang perpolitikan Sukiman juga menjadi faktor bahwa Sukiman layak diusung sebagai Calon Bupati pada pilkada tahun 2020.

c. **Seleksi**

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwasanya ranah rekrutmen politik dijalankan berdasarkan proses seleksi yang dilakukan oleh cabang, dan daerah, dengan mengedepankan tahapan sertifikasi dan nominasi. Kemudiansetelah memenuhi syarat akan diseleksi oleh pusat (DPP) partai dan kemudian akan diberikan SK untuk melaju dan mendaftarkan sebagai calon dari partai politik yang diusung. Tentunya SK yang diberikan dengan pertimbangan yang jelas dari elektabilitas, popularitas, ketokohan, dan kinerja

yang dilakukan, serta track rekor di masyarakat.

3. Partai Politik sebagai fungsi Komunikasi Politik

Dalam hal ini ada beberapa cara yang digunakan tim koalisi pasangan calon No urut 2 Sukiman-Indra Gunawan. Tim koalisi juga menggunakan bentuk yang padu dalam melaksanakan kegiatan komunikasi politik antara lain;

a. Retorika Politik

Tim koalisi pasangan No urut 2 juga melakukan kegiatan retorika politik dan menyampaikan pesan politik kepada publik melalui retorika politik. Dalam hal ini yang menyampaikan adalah tim pemenang itu sendiri atau calon yang ada.

b. Kampanye Politik

Tim pemenang pasangan calon No. urut 2 Sukiman-Indra Gunawan menggunakan media massa dalam melakukan kampanye pada saat itu. Selain itu juga komunikasi yang dilakukan Tim koalisi adalah melalui kampanye Intrapersonal. Kampanye ini melibatkan kandidat itu sendiri ataupun bisa dilakukan oleh juru kampanye, istri, atau tim relawan dan sahabat dekat. Kemudian, ada juga yang dinamakan kampanye organisasi yaitu kampanye yang dilakukan untuk

mengarahkan anggota dan memberikan tekanan kepada calon anggota pejabat yang memiliki organisasi seperti serikat buruh, asosiasi perusahaan, kelompok tani, himpunan dan kerukunan, organisasi hak sipil, dan lainnya.

c. Lobby politik

Lobby politik merupakan salah satu bentuk seni dan teknik berkomunikasi yang banyak sekali diaplikasikan dalam kegiatan politik. Lobby politik dan partai politik yaitu merupakan forum pembicaraan politik dalam perspektif atau paradigma interaksional dalam komunikasi politik diterapkan dalam bentuk komunikasi antar personal atau tatap muka yang bersifat dialogis.

Selain itu juga terdapat strategi dalam melaksanakan komunikasi politik yaitu

- a. Merawat Ketokohan
- b. Memantapkan Kelembagaan
- c. Menciptakan Kebersamaan
- d. Membangun Konsensus

4. Partai Politik sebagai fungsi Pengatur Konflik

Tim koalisi pasangan no urut 2 Sukiman-Indra Gunawan sebagai gabungan dari beberapa partai politik harus bisa menjadi sarana pengatur konflik dimasyarakat. Tim koalisi berperan menjadi penengah antara pilihan masyarakat dan

meyakinkan masyarakat terhadap pilihannya serta tidak membuat isu yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut perlu adanya tim koalisi yang solid serta tidak mengangkat isu SARA yang menyebabkan perpecahan di masyarakat. Tim koalisi juga harus menjadi sarana dalam meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat.

Tim koalisi Rokan Hulu Maju juga berupaya menekan konflik yang terjadi di masyarakat, artinya tim koalisi Rokan Hulu Maju tidak membawa isu yang membawa perpecahan seperti isu SARA, kepentingan golongan tertentu, dan juga menjelekkkan lawan politik. Dengan Hal ini, Partai politik koalisi sebagai pengatur konflik dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang dapat menekan konflik yang ada dimasyarakat khususnya pada pilkada di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020. Dengan adanya konflik pada pasangan calon yang ada yang berujung gugatan kepada Mahkamah Konstitusi maka tim koalisi berupaya menjadi agen yang dapat mengatur konflik yang ada. Hal ini dibuktinya dengan berjalannya pilkada tahun 2020 di kabupaten Rokan Hulu yang damai, tertib dan aman mulai dari awal pada masa pencalonan, kampanye, hari pemungutan suara, dan juga pasca pilkada dan juga

saat berlansungnya Pemilihan Suara Ulang.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Fungsi Sosialisasi politik yang dilakukan tim koalisi No Urut 2 telah berhasil dilaksanakan dengan menerapkan mulai dari agen sosialisasi politik, materi, mekanisme, dan juga pola sosialisasi politik yang dijalankan. Proses sosialisasi politik juga telah berhasil diterapkan dengan menggunakan proses yang berhasil diaplikasikan seperti pemilihan badan/organisasi, persiapan sosialisasi, perumusan target, pengembangan dan penentuan target sosialisasi, dan pemilihan target sosialisasi.
2. Fungsi Rekrutmen Politik yang dilakukan oleh tim koalisi No. Urut 2 dijalankan dengan menggunakan pola rekrutmen politik dalam menentukan kandidat pasangan calon yang akan diusung mulai dari sertifikasi, nominasi, dan seleksi. Dalam hal ini telah dijalankan oleh tim koalisi melalui internal masing-masing partai dengan menentukan kandidat calon sehingga terbentuk tim koalisi No urut 2.
3. Fungsi Komunikasi politik yang dilakukan oleh tim koalisi No. Urut 2 dapat dilakukan dengan bentuk atau kegiatan komunikasi politik seperti retorika politik, kampanye politik, dan juga lobi politik. Terdapat juga

strategi komunikasi politik yang dijalankan oleh tim koalisi No. Urut 2 dengan cara merawat ketokohan, memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan, dan membangun konsensus. Tentunya hal ini berpengaruh terhadap tim koalisi No. Urut 2.

4. Fungsi sebagai sarana pengatur konflik dilakukan tim koalisi No. Urut 2 dilakukan dengan cara menekan terjadinya pergesekan antar masyarakat dalam melakukan fungsi sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat. Tim koalisi No. urut 2 melakukan kegiatan politik pada masa kampanye dengan mengedepankan kampanye damai serta menghindari dari isu SARA yang menyebabkan perpecahan. Sehingga pada pelaksanaan pilkada tidak terjadi konflik dimasyarakat mulai dari penetapan calon, pembentukan tim koalisi, masa kampanye, hingga pasca pilkada yang telah dilaksanakan.

Saran

1. Partai politik sebaiknya menjadi infrastruktur politik yang baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia tidak hanya pada pelaksanaan kegiatan pesta demokrasi saja/pemilu, akan tetapi turut hadir di tengah masyarakat dengan melakukan penerapan fungsi parpol serta penguatan kelembagaan politik.
2. Melakukan revitalisasi partai politik melalui paradigma

yang terjadi sehingga mampu menciptakan kader dan pemimpin yang baik bagi masyarakat.

3. Agar dapat memperbaiki citra publik dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik melalui komunikasi politik yang baik terhadap masyarakat.
4. Agar partai politik dapat menekan konflik melalui pendekatan yang ada di masyarakat baik saat pemilu maupun dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, S.IK.,M.Si, Dr H Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ke satu. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Agustino, Leo. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Cetakan pe. Yogyakarta: CV. PUSTAKA BELAJAR, 2009.
- Budiarjo, Miriam Prof. *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*. Cetakan ke. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Radja Grasindo Persada, 2011.
- Efriza, NFN. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 10, no. 1 (2019): 17–38.
- Indrayana, Denny. *Indonesia Optimis*. Jakarta: CV. Bhuana Ilmu Populer, 2011.
- Manalu, Sopian Ependi, and Nurul Nurhandjati. "Dinamika Koalisi Partai Politik Dalam Pilkada

- Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018.” *Journal Publicuho* 4, no. 4 (2021): 1025–1042.
- Murdiyanto, Dr Eko. *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Kesatu. Yogyakarta: LPPM UPNVY Press, 2020.
- Olis Linani. “PELAKSANAAN SOSIALISASI POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN MELALUI MEDIA LUAR RUANG DI KOTA PONTIANAK.” *jurnal aspirasi* 3, no. September (2015): 1–14.